

**PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Studi Multi Kasus terhadap Lembaga Filantropi
Berbasis Agama Antara Lembaga Manajemen Infaq
(LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP)
di Desa Klepu**

TESIS



Oleh:
Hanafi Hadi Susanto
NIM 212115015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PASCASARJANA
AGUSTUS 2017**

ABSTRAK

Hadi Susanto Hanafi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural: Studi Multi Kasus terhadap Lembaga Filantropi Berbasis Agama Antara Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di Desa Klepu*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonmi, Filantropi, Masyarakat Multikultural.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis agama di berbagai wilayah telah banyak dilakukan, khususnya pada masyarakat homogen. Pemberdayaan ekonomi yang fokus pada masyarakat majemuk/multikultural masih jarang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis agama. Pemberdayaan ini membutuhkan strategi dan model pendekatan khusus, karena antara daerah satu dengan yang lainnya tingkat kemajemukannya berbeda.

Lembaga filantropi keagamaan yang telah menerapkan pemberdayaan pada masyarakat multikultural ini adalah Lembaga manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di Desa Klepu. Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural berbasis lembaga filantropi keagamaan sangat dibutuhkan karena untuk mengetahui dan mendalami praktik pemberdayaan ekonomi dari kedua lembaga. Penelitian ini tidak hanya sekedar membandingkan antara kedua lembaga, namun peneliti berusaha menggali makna-makna dari praktik pemberdayaan yang dilakukan.

Penelitian ini membahas (1) bagaimana strategi dan model pemberdayaan ekonomi pada masyarakat multikultural di Desa Klepu, (2) bagaimana implikasi pemberdayaan terhadap masyarakat baik secara sosial maupun kemandirian ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik. Lokasi penelitian ini berada di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penelitian ini menghasilkan temuan, (1) strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat multikultural yang digunakan oleh lembaga LMI bersifat demokratis atau kerakyatan, sedangkan DPP bersifat terpusat pada pengurus. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI adalah dari bawah (bottom up), sedangkan DPP dari atas kebawah (top down). (2) Implikasi dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga filantropi LMI maupun DPP yaitu, tingkat religiusitas masyarakat semakin meningkat. Dalam perubahan sosial ekonomi yaitu, tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang meningkat, gaya hidup berubah, teknologi semakin membaik, bertambahnya lapangan pekerjaan, serta terciptanya persediaan bahan pangan yang melimpah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.¹

Sedangkan menurut Mardikanto pemberdayaan diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.²

Pemberdayaan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada saat ini banyak dijumpai berbasis

¹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), 100.

² Ibid.

lembaga atau instansi. Begitu juga Kabupaten Ponorogo, di kabupaten ini lembaga filantropi berbasis agama sangat banyak. Banyaknya lembaga filantropi ini kemungkinan besar disebabkan salah satunya karena kondisi dan keberadaan Kabupaten Ponorogo yang terkenal dengan sebutan kota santri (banyak pondok pesantren).

Meskipun Kabupaten Ponorogo dikenal banyak pondok pesantren dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi beberapa wilayah yang ada di kabupaten ini umat kristiani sangat banyak,³ dan kedua keyakinan ini semakin hari semakin berkembang, khususnya yang ada di Desa Klepu. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tabel pemeluk agama di Kecamatan Sooko di bawah ini.

³ Berdasarkan data dari BPS dalam Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo: Agama Islam berjumlah 839.127 jiwa (98,11%), Agama Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%), Agama Budha berjumlah 261 jiwa (0,03%), Agama Hindu 82 jiwa (0,01%) kong Hu Cu 25 jiwa (0,002%) dan agama lainya 25 jiwa (0,003%), sedangkan 10.640 jiwa tidak terjawab dan tidak ditanyakan. Dari data ini sangat jelas bahwa agama penganut agama Kristen di Ponorogo terbanyak setelah agama Islam.

Tabel 1.1
 Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Pemeluk Agama dan Kelurahan/Desa
 Kecamatan Sooko Pada Akhir Tahun 2014
 (Berdasarkan Hasil Registrasi)⁴

Kelurahan/Desa	Islam	Kristen	Kristen (Katolik)	Hindu	Budha	Kongh ucu	Kepercayaan
Ngadirojo	4.881	-	-	-	-	-	-
Klepu	1.382	16	1.390	-	-	-	-
Suru	4.783		6	-	-	-	-
Sooko	3.385	5	5	-	-	-	-
Bedoho	2.625	-	-	-	-	-	-
Jrug	6.688	3	23	-	-	-	-
Jumlah 2014⁵	23.744	24	1.424	-	-	-	-
Jumlah 2013	23.639	24	1.433	-	-	-	-
Jumlah 2012	23.533	22	1.425	-	-	-	-

⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Ponorogo dalam Angka 2015 dan data dari kantor camat Sooko.

⁵ Jumlah di atas berdasarkan jumlah dari satu kecamatan dalam hitungan satu tahun.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa umat Kristen khususnya Desa Klepu umat Kristen dan juga Islam sama-sama kuat secara kuantitatif. Selain itu, jumlah umat Kristen dan juga umat Islam dari tahun ke tahun semakin berkembang.

Dalam mengelola umatnya, kedua agama ini mempunyai manajemen dan lembaga masing-masing. Baik yang mengurus bidang aqidah, ibadah maupun perekonomian umat. Di Kabupaten Ponorogo, desa yang menjadi sorotan utama publik mengenai kedua agama ini salah satunya adalah Desa Klepu. Berbeda dengan wilayah lain, Agama Kristen yang ada di Desa Klepu sangat kuat. Hal ini terbukti bahwa Keuskupan⁶ Surabaya mempunyai tempat ziarah terkenal yaitu Gua Maria Fatima Sendang Waluyo Jatiningasing yang berada di Desa Klepu ini. Sendang Waluyo Jatiningasih diresmikan oleh Uskup⁷ Surabaya sejak 27 Mei 1988. Pada awal tahun 2000, tepatnya tanggal 25 Desember 1999 tempat ziarah Sendang Waluyo Jatiningasih termasuk Gereja Sukramen Mahakudus, sehingga Desa Klepu merupakan salah satu tempat untuk mendapatkan anugrah indulgensi. Sehingga dengan

⁶ Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif yang diatur oleh seorang uskup. (Wikipedia.org diakses pada 28 Desember 2016, 07:10 WIB)

⁷ Uskup (serapan dari bahasa Arab *asqf*) adalah pimpinan gereja setempat yang bernama keuskupan. (Wikipedia.org)

mendapatkannya indulgensi⁸ jumlah peziarah dari berbagai tempat meningkat, baik dari Keuskupan Malang, Semarang maupun Jakarta.⁹ Selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat, Desa Klepu adalah desa tertua (awal) menganut ajaran Kristen. Paham agama Kristen di Desa klepu sangat kuat, hal ini bisa diketahui salah satu faktanya adalah adanya penambahan umat Kristen dari kalangan kurang mampu maupun hasil pernikahan beda agama. Selain itu perhatian dari pengurus dewan greja wilayah selalu dipantau dan mendapatkan dana bantuan sosial keagamaan.¹⁰ Meskipun Agama Kristen sangat kuat namun masyarakat muslim juga tidak kalah kuatnya, hal ini disebabkan banyaknya perhatian dari lembaga-lembaga Islam dan juga tokoh-tokoh agama.

Desa Klepu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, yang sangat dikenal oleh masyarakat luas salah satunya dengan adanya percampuran agama Islam dan Kristen. Meskipun di desa ini segi ideologi berbeda dan berseberangan namun kenyataannya tidak pernah ada gesekan maupun konflik antara

⁸ Indulgensi (bahas Inggris *indulgence*) adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara atas dosa yang sudah/pernah dilakukan. Dikutip dari Wikipedia (<https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?fulltext=Cari&search=indulgensi&searchToken=bkv1k1gkw526trqppcf0ske4f> diakses pada 28 Desember 2016, 06:30 WIB)

⁹ Guamariasejarah.blogspot.co.id diakses pada Rabu 14 Desember 2016, 16:47 WIB.

¹⁰ Hasil observasi Peneliti di Desa Klepu dan wawancara kepada pengurus dewan gereja pada 10 Desember 2016, 13:10 WIB.

keduanya.¹¹ Hal ini bisa dilakukan karena adanya koordinasi antara pengurus dari masing-masing agama yang tidak menitikberatkan perbedaan mereka, namun mencari sebuah solusi demi terwujudnya kesatuan dan persatuan.

Walaupun Desa Klepu secara umum dikenal dengan agama Islam dan Kristen, namun kenyataannya paham/ideologi di Desa ini masih dipecah menjadi beberapa kelompok. Misalnya agama Islam terdiri dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Tabligh, Kejawen dan seterusnya. begitu juga agama Kristen Ada yang Protestan, dan ada juga yang Katolik. Dari perbedaan-perbedaan inilah maksud dari peneliti bahwa Desa Klepu adalah desa yang masyarakatnya multikultural.

¹¹ Sebenarnya pernah terjadi gesekan antara kedua Agama ini, salah satu contohnya kasus pada tahun 2015, tentang limbah peternakan babi yang di buang ke sungai. Dengan pembuangan limbah kesungai masyarakat menjadi tidak nyaman dan terganggu karena air sungai itu jika mengenai warga dapat menyebabkan gatal-gatal. Akan tetapi konflik ini diselesaikan dengan kekeluargaan dengan mengundang beberapa tokoh dan mencarikan solusinya. Kasus-kasus semacam ini menurut masyarakat khususnya warga Desa Klepu bukanlah konflik besar dan masyarakat menganggapnya hal biasa (bukan konflik). Sejauh konflik bisa diredam oleh pemuka agama setempat maka hal ini adalah kejadian biasa. Mereka mengatakan konflik ketika adanya masalah yang tidak ada solusi dan menyebabkan peperangan, menyebabkan perpecahan kekeluargaan antar warga masyarakat. (hasil wawancara dengan tokoh masyarakat agama Islam (Bapak Karsi) dan tokoh agama Kristen (Bapak Prpto) Pada 19 dan 20 Oktober 2016).

Perbedaan ideologi menjadi keberuntungan tersendiri bagi masyarakat Desa Klepu, karena dengan adanya perbedaan ideologi Desa Klepu menjadi sentral dari banyak fihak baik dari lembaga yang beragama Islam maupun Kristen. Keadaan ini dapat diketahui antara lain adanya lembaga penggerak ekonomi masyarakat yakni BMH (Baitul Mal Hidayatullah), Yayasan Petera, LMI (Lembaga Manajemen Infaq), DPP (Dewan Pastoer Paroki/Dewan Gereja), dan seterusnya.¹²

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertugas untuk membantu masyarakat yang akan menunaikan zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.¹³ BMH ini juga pernah ikut andil dalam pemberdayaan umat di Desa Klepu, namun kegiatan yang dilakukan lebih cenderung bersifat bantuan konsumtif. Sehingga tidak ada tindak lanjut berkelanjutan atas dana yang di berikan.¹⁴

Yayasan Petera adalah sebuah yayasan pendidikan yang didirikan pada 22 April 1951.

¹² Bapak Partomo (bapak Lurah Desa Klepu), Wawancara, Desa Klepu Kecamatan Sooko, pada Minggu 21 Agustus 2016, 11:15 WIB.

¹³ www.bmh.or.id/tentang.php diakses pada 25 Desember 2016, 13:10 WIB.

¹⁴ Ibid.

Hingga saat ini yayasan Petera mengelola 2 wilayah yakni Surabaya dengan 28 sekolah dan Sidoarjo 5 sekolah.¹⁵ Berdasarkan keterangan dari pengurus Dewan Gereja (Bapak Prapto), Yayasan Petera ini sama halnya dengan BMH yaitu Lembaga ini ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Klepu khususnya umat Kristen. Akan tetapi bantuan yang diberikan juga berupa bantuan konsumtif (dana) ketika kegiatan baksos di wilayah Desa Klepu.

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) adalah lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat *dua*fa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF dan dana CSR. LMI sebagai salah satu lembaga LAZNAS, memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di Indonesia.¹⁶

Dewan Patoer Paroki (DPP). Lembaga DPP merupakan himpunan atau badan konsultatif dalam paroki¹⁷ yang fungsinya memberikan saran mengenai

¹⁵[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petera](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pendidikan_dan_Pengajaran_Kristen_Petera) diakses pada 26 Desember 2016, 21:37 WIB.

¹⁶ [Lmizakat.org/profil-lembaga](http://lmizakat.org/profil-lembaga). Diakses pada Selasa 23 Agustus 2016, 16:10 WIB.

¹⁷ Paroki berasal dari bahasa Yunani *parokein* artinya musafir, pengembara. Pada umumnya mengesankan suatu tipe pembagian administratif. Istilah ini digunakan beberapa gereja Kristen, terutama Gereja Katolik Roma, Komuni Anglikan, dan Gereja Ortodoks. Paroki dalam Gereja Katolik disebut sebagai kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam keuskupan (Gereja Partikular). Sebagaimana Gereja terutama adalah himpunan umat beriman, bukan gedung, maka pengertian paroki pun

hal-hal pastoral kepada uskup deosean atau pastor (imam) paroki.¹⁸ secara langsung manajemen pengelolaannya dihimpun dan dilakukan oleh Dewan Gereja. Lembaga DPP juga memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Desa Klepu.

Lembaga-lembaga di atas adalah lembaga filantropi yang memberi andil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat multikultural yang ada di Desa Klepu. Dari beberapa lembaga itu dua lembaga (LMI dan DPP) hingga saat ini masih berperan aktif sebagai pendamping ekonomi masyarakat, sedangkan dua lembaga (BMH dan Petera) lainnya juga aktif akan tetapi dua lembaga ini lebih menekankan pada masyarakat yang satu wilayah menganut satu paham atau dengan kata lain bukan pada masyarakat multikultural seperti halnya yang ada di Desa Klepu.¹⁹

Sebagai lembaga filantropi, LMI mendirikan desa binaan di Desa Klepu yang difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat/desa binaan pada daerah tertinggal adalah hal yang biasa dilakukan lembaga

pertama-tama adalah himpunan orang , bukan sekedar wilayah, walaupun sifat kewilayahan sebagai aspek yang tetap juga inheren padanya (Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, Kanon 515 art. 1). Dikutip dari Wikipedia.org diakses pada 28 Desember 2016, 21:37 WIB.

¹⁸ Wikipedia.org (Dewan Pastoer Paroki). Di akses pada 28 Desember 2016, 06:15 WIB.

¹⁹ Umi (pengurus LMI Cabang Ponorogo), wawancara, di kantor LMI Ponorogo, 05 September 2016 09:10 WIB.

filantropi, namun LMI berani melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada masyarakat yang multikultural. Hal inilah yang membedakan antara LMI dengan lembaga LAZNAS lainnya khususnya lembaga filantropi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Karena LMI merupakan salah satu lembaga LAZNAS yang menjalankan program pemberdayaannya di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai latar belakang ideologi yang berbeda, maka LMI mempunyai beberapa strategi dan model pemberdayaan dalam memberdayakan masyarakat Desa Klepu. Salah satu bentuk strategi dan model pemberdayaan itu antara lain adalah dengan bantuan yang bersifat konsumtif dan juga program yang bersifat produktif. Strategi dan model pendekatan pemberdayaan masyarakat secara rasional dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan visi dan misi lembaga khususnya di Desa Klepu, mengingat lembaga yang ada di desa ini tidak hanya satu lembaga.

LMI banyak memberikan bantuan secara konsumtif dalam bentuk memberi kebutuhan untuk makanan pokok, bantuan kegiatan masyarakat, bantuan dana secara tunai dan seterusnya. Selain itu, LMI juga memberikan bantuan yang berorientasi pada produktifitas aset yaitu mendirikan balai pelatihan, memfasilitasi masyarakat berternak ayam, program pelatihan pembuatan pupuk organik, rencana pembuatan koperasi dan lain-lain. Dalam mendistribusikan bantuan dana yang bersifat

konsumtif dan juga program yang bersifat produktif, LMI lebih mengkhususkan bagi masyarakat muslim, akan tetapi tidak menuntut kemungkinan LMI juga memberikan dan melibatkan non muslim ketika umat kristen itu dirasa ada kemungkinan akan menjadi mualaf.

Berbicara lembaga filantropi yang ada di Desa Klepu, maka yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang ada di bawah naungan Dewan Gereja yaitu DPP. Dalam pandangan masyarakat Desa Klepu secara umum, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan DPP sudah ada sejak Agama Kristen ada di Desa Klepu, akan tetapi pemberdayaan ekonominya masih terbatas pada pemberian bantuan yang bersifat konsumtif kepada masyarakat kurang mampu. Sekitar tahun 1990-2000an DPP mencoba membuat model pemberdayaan ekonomi baru, yakni pemberdayaan ekonomi dengan produktifitas aset sebagaimana yang banyak diterapkan oleh lembaga filantropi Islam salah satunya yang dilakukan oleh LMI.²⁰

Menurut keterangan Bapak Suprpto selaku pengurus DPP ketua bagian ekonomi menjelaskan:

“Program (produktifitas aset) yang saat ini dijalankan lebih tepat dan lebih sesuai, karena dengan adanya pemberdayaan yang bersifat produktif ini masyarakat Desa Klepu khususnya umat Kristen maupun masyarakat muslim yang

²⁰ Bapak Prapto (ketua DPP bidang ekonomi), wawancara, Desa Sooko Kecamatan Sooko, Selasa 04 September 2016 12:30 WIB.

ikut dalam program ini tidak akan terpaku atau istilah desa sini menyebut kecanduan bantuan (ketergantungan bantuan) dari lembaga DPP/ Dewan Gereja.²¹

Meskipun pemberdayaan yang dilakukan oleh Dewan Gereja ini sebenarnya sudah berjalan lebih awal dibandingkan pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI,²² namun kenyataannya menurut tokoh agama Islam memandang bahwa lembaga filantropi LMI perkembangan dan programnya berjalan lebih optimal. Hal ini bisa dilihat salah satunya program yang hingga saat ini berjalan adalah peternakan ayam petelur dan program terdekatnya adalah pembuatan kelompok koperasi khusus ayam petelur serta pembuatan pakan secara mandiri.²³

DPP strategi dan model pendekatan dalam pemberdayaan ekonominya sekilas tidak jauh berbeda dengan LMI yakni dengan adanya program konsumtif dan juga produktif, dalam masalah penyaluran dan kegiatannya terkait produktifitas aset DPP lebih fleksibel dalam arti membuka peluang bagi masyarakat Desa Klepu baik yang muslim

²¹ Ibid.

²² Yakni sesuai pendapat dari tokoh Gereja di atas bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP sudah sejak adanya Agama Kristen di Desa Klepu akan tetapi model yang diterapkan masih bersifat konsumtif dan tahun 1990an mulai dikembangkan produktif. Sedangkan LMI masuk di Desa Klepu masih relatif muda, LMI mulai pendampingan ekonomi masyarakat di Desa Klepu sekitar tahun 2008-2011an. Jauh lebih awal DPP berkembang di Desa Klepu

²³ Ibid.

maupun yang beragama Kristen diperbolehkan mengikuti programnya. Dalam proses penyalurannya ini dimungkinkan adanya faktor intern dari masing-masing agama dan tidak masuk dalam wilayah penelitian ini.

Meskipun sekilas strategi dan model pendekatan kedua lembaga filantropi ini sama, namun ketika diperdalam banyak sekali perbedaan-perbedaan, baik dari manajemen dan strategi pengelolaannya, produk yang dihasilkan, model pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat dan seterusnya. Selain itu, antara masing-masing lembaga filantropi ini memiliki kekurangan/kelemahan dan kelebihan tersendiri khususnya dalam program produktifitas.

Salah satu kelemahan DPP dibandingkan dengan LMI, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh DPP belum begitu berhasil dan kurang optimal. Misalnya adalah dalam proses pembuatan pupuk kompos yang diselenggarakan oleh DPP kepada petani di Desa Klepu. Hal ini kurang optimal disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pupuk kompos dan juga kalahnya persaingan paangsa pasar.²⁴ Akan tetapi dalam program lain DPP mempunyai program yang luar biasa dalam produktifitas aset, yakni salah satunya adalah

²⁴ Sukarsi (tokoh Desa Klepu sekaligus pengelola program LMI desa klepu), wawancara , Desa Sooko Kecamatan Sooko, 23 Agustus 2016 pukul 09:00 WIB.

pengelolaan lumbung pangan bagi masyarakat desa Klepu.

Dari paparan LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi, dapat diketahui sedikit gambaran masing-masing lembaga mempunyai strategi dan model pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi. Strategi dan model pendekatan pemberayaan lembaga filantropi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan, misalnya model pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan baik secara konsumtif maupun produktif. Strategi maupun model pendekatan yang dilakukan lembaga filantropi (LMI dan DPP) tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan.

Dari beberapa gambaran di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti dua lembaga yang sama-sama memberikan kontribusi besar bagi Desa Klepu. Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan alasan-alasan tersebut misalnya, obyek bidikan atau sasaran pemberdayaannya satu tetapi pembidik adalah dua lembaga yang berbeda. Baik perbedaan dari segi ideologi, produk yang dihasilkan, pengaruh, maupun dari segi manajemen pengelolaannya. Ketika ada dua lembaga yang berbeda dan kedua-keduanya semakin berkembang, sementara objek bidikan/desa binaan satu wilayah, tentu dimungkinkan adanya persaingan dari masing-masing lembaga filantropi ini. Jika program-program mereka sama, strategi dan menegemen sama, model pendekatannya sama maka menurut peneliti kedua

lembaga filantropi ini akan berkoalisi dan menjadi satu kesatuan sehingga lembaga filantropi akan menjadi lebih besar dan lebih maju.

Alasan yang unik dan tidak kalah menarik bahwa lembaga filantropi ini posisinya berada ditengah masyarakat yang multikultural, jikalau di beberapa wilayah di Ponorogo atau bahkan di daerah lain umumnya lembaga filantropi mempunyai desa binaan besar, tetapi desa binaannya lebih pada masyarakat pinggiran, masyarakat kurang mampu, masyarakat yang idiot atau bahkan desa tertinggal, namun daerah binaannya tidak multikultural seperti halnya yang dilakukan lembaga filantropi LMI dan juga DPP di Desa Klepu. Inilah salah satu hal yang paling mencolok yang membedakan pemberdayaan ekonomi antara Desa Klepu dengan desa lainnya.

Di sisi lain hal yang menarik adalah kedua lembaga ini bisa berjalan dengan eksis tanpa menimbulkan gesekan konflik di masyarakat. Meskipun memang pernah terjadi beberapa gesekan akan tetapi menurut masyarakat hal demikian ini biasa dan dianggapnya bukan suatu masalah/konflik besar.

Selain itu, berdasarkan penjelasan di atas bahwa lembaga filantropi LMI jika dibandingkan dengan DPP umurnya relatif lebih muda, akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI dapat mengimbangi/setara bahkan dalam program tertentu lebih unggul dari DPP yang umurnya relatif lebih lama. Sehingga penulis akan meneliti dua hal yang

menurut peneliti membutuhkan jawaban dengan adanya sebuah penelitian. Dua hal ini adalah yang pertama tentang strategi dan model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat multi kultural oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu. Sedangkan yang kedua yaitu tentang pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi berbasis agama terhadap masyarakat multi kultural di Desa Klepu. Dua permasalahan ini menjadi rumusan masalah sekaligus fokus penelitian dalam tesis ini. Diharapkan fokus penelitian menemukan strategi dan model dari masing-masing lembaga dan dapat mengetahui implikasi khususnya tingkat keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat multikultur. Mengingat di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo masih banyak lembaga filantropi dan banyak masyarakat yang harus diberdayakan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi dan model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat multi kultural oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu?
2. Bagaiman implikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi berbasis agama terhadap masyarakat multi kultural di Desa Klepu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta memahami perbedaan maupun persamaan strategi dan Model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat multi kultural oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi berbasis agama terhadap masyarakat multi kultural di Desa Klepu. Selain itu untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan masing-masing lembaga filantropi yang ada di Desa Klepu.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan, secara akademis dapat menguatkan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat multi kultural yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis agama. Jika program pemberdayaan ekonomi masyarakat diterapkan secara optimal dan baik, maka akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat salah satunya bisa menambah kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi sekaligus masukan bagi lembaga-lembaga filantropi dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat multikultural, khususnya kepada dua lembaga (LMI dan DPP), sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MULTIKULTURAL BERBASIS LEMBAGA FILANTROPI KEAGAMAAN

E. Telaah Pustaka

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain:

Pertama jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh dengan judul penelitian Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Pada Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto). Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), dimana penyusun akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (in depth study) dengan tujuan untuk mengetahui model manajemen strategis dan pengelolaan ZIS melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa model manajemen strategis yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah dimulai dari pertama, pengamatan lingkungan yang terdiri analisis eksternal (berupa peluang dan ancaman) dan analisis internal (berupa kekuatan dan kelemahan). Kedua, perumusan strategi, dalam tahapan ini adalah lebih pada penguatan visi misi, serta bagaimana memanfaatkan peluang, ancaman, kekuatan, serta

kelemahan untuk membentuk strategi dalam pengelolaan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan ZIS. Ketiga Implementasi Strategi, setelah terbentuk beberapa strategi langkah selanjutnya adalah menuangkan dalam berbagai program. Sebagai program unggulan yaitu beasiswa dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengguliran kambing. Keempat, evaluasi dan pengendalian, sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian, LAZIS mengadakan evaluasi setiap selesai melaksanakan program secara bersama serta untuk perbaikan program-program selanjutnya.²⁵

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Besse Wediawati, judul jurnal penelitian yang dilakukan oleh Besse adalah Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi (Studi pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi). Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui Kinerja dan Strategi penghimpunan dana Lembaga Pengumpul Zakat di Kota Jambi. Kemudian mengetahui Pola Berderma masyarakat Muslim di Kota Jambi, dan tujuan terakhir adalah mengembangkan solusi bagi revitalisasi Filantropi Islam di Kota Jambi menuju pemberdayaan umat. Objek penelitian ini adalah Lembaga Pengumpul

²⁵ Siti Maghfiroh, “Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Pada Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto)”, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2 (Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, 2015)

Zakat (LPZ), BAZDA Provinsi Jambi dan LAZ RSIM serta 150 Orang Masyarakat Muslim pemberi derma. Pengumpulan data melalui library research dan field research yaitu indepth Interview dengan Pengurus BAZDA dan LAZ RSIM serta Penyebaran Kuisisioner ke 150 orang responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Kedua LPZ baik BAZDA maupun LAZ masih mengalami kendala dan hambatan untuk beroperasi secara profesional baik dari sisi penderma (muzaki) terutama karena lemahnya kepercayaan terhadap LPZ maupun dari sisi aspek manajerial dan kelembagaan (keterbatasan dalam penggalian dana, ketidaktajaman program dan akuntabilitasnya), hasil penelitian kedua yaitu pola berderma masyarakat Muslim di Kota Jambi masih sebatas karitas (charity), diberikan secara langsung kepada penerima zakat dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif, hasil penelitian yang terakhir adalah revitalisasi peran LPZ diperlukan untuk menggeser pola filantropi dari karitas mengarah ke pemberdayaan umat melalui sosialisasi gerakan zakat yang terencana, terpadu, meluas dan berkesinambungan dari semua penggiat zakat, peningkatan profesionalitas manajemen LPZ, Sinergi jejaring kelembagaan LPZ di Kota Jambi, serta dukungan pemerintah untuk menjadikan

gerakan zakat sebagai salah satu solusi pemberdayaan umat di Kota Jambi.²⁶

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aan Nasrullah, dengan judul penelitiannya adalah Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur), tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Baitul Mal Hidayatullah (BMH) cabang Malang mengelola dan mendistribusikan dana filantropi (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat miskin. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana filantropi yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa).²⁷

²⁶ Besse Wediawati, "Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi (Studi Pada Lembaga Zakat Dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma Di Kota Jambi)", Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Vol. 14, No. 1, (Jambi: Universitas Jambi, 2012), 47.

²⁷ Aan Nasrullah, "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)", Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Martina dengan judul penelitian, Strategi Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kegiatan program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LP2M, mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan, dan merumuskan strategi LP2M di Kota Padang dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengembangan program pemberdayaan perempuan oleh LP2M di Kota Padang difokuskan pada program penguatan KPUK sebagai wadah pengembangan ekonomi rakyat. Proses kegiatan program dimulai dari persiapan (planning) program yang terdiri dari LP2M dalam pengembangan program, pelaksana program (pendamping dan CO) LP2M, komunitas sasaran, dana program LP2M, serta penyiapan sarana dan prasarana penunjang. Pada pelaksanaan (action) program terdiri dari kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan KPUK serta LKP, kegiatan penyaluran dana bergulir serta kegiatan-kegiatan pelatihan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring

dan evaluasi serta rekomendasi dari peneliti terhadap pengembangan program pemberdayaan perempuan.²⁸

Kelima penelitian tesis yang dilakukan oleh Sukmaniar dengan judul penelitian, Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian ini mengutamakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini secara umum pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga kurang efektif dalam meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh tipologi keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum program pembangunan diimplementasikan maka perlu dilakukan proses penyiapan masyarakat secara intensif berupa peningkatan motivasi (tahapan afektif), peningkatan wawasan pengetahuan (tahapan kognitif) dan peningkatan ketrampilan (tahapan

²⁸ Martina, “Strategi Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kota Padang” (Universitas Andalas, Padang , 2011).

psikomotorik) untuk menunjang peran masyarakat dalam pembangunan (tahapan konatif).²⁹

Dari beberapa penelitian di atas, ada beberapa kemiripan penelitian yaitu semuanya membahas tentang lembaga filantropi pendekatan penelitian yang dilakukan juga banyak kemiripan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, beberapa penelitian di atas yang sangat dekat dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh dengan judul penelitian Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Pada Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto). Meskipun penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Siti Maghfiroh ada kemiripan, akan tetapi sangat banyak perbedaan. Perbedaan itu misalnya dalam model manajemen strategi antara lembaga filantropi satu dengan yang lainnya tentu sangat berbeda, karena harus menyesuaikan daerah pemberdayaannya, kemudian penelitian Siti Maghfiroh ini hanya sebatas mengetahui peluang dan tantangan dari lembaga yang diteliti serta manajemen strategi yang diutamakan, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti ini tidak hanya ingin mengetahui model

²⁹ Sukmaniar, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

manajemen strategi dari lembaga filantropi namun juga ingin membandingkan strategi dua lembaga filantropi dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh adalah wilayah atau daerah yang biasa disasar oleh lembaga filantropi atau secara singkat bukan suatu wilayah yang mempunyai kultur yang berbeda, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada wilayah yang masyarakatnya multikultural.

F. Telaah Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Berbasis Lembaga Filantropi Keagamaan

Di era globalisasi seperti saat ini, banyak lembaga filantropi berbasis agama yang berperan untuk mengelola perekonomian umat bersumber dari dana ziswaf (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf). Namun kenyataannya peran lembaga filantropi di Indonesia sangat jarang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang fokus pada masyarakat yang beraneka ragam atau sering disebut dengan masyarakat multikultural. Agar lebih mudah dipahami, berikut ini diuraikan secara detail pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lembaga filantropi keagamaan.

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Lembaga Filantropi Keagamaan

a. Filantropi Berbasis Agama

Sebelum membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat secara rinci, penting kiranya memahami lembaga filantropi berbasis agama. Secara etimologis, makna filantropi (philanthropy) adalah kedermawanan, kenyamanan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.³⁰ Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (service) dan asosiasi (association) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.³¹

Perubahan sosial dapat berubah disebabkan beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yaitu:³²

- 1) Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Faktor internal penyebab perubahan sosial seperti:

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995).

³¹ Nur Kholis Dkk., "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*", Volume IV, No. 1, Juli (Jogjakarta: Department Of Islamic Economics, 2010),

³² Ibid.

- a) Kesadaran individu/masyarakat berkaitan dengan keterbatasan fungsi nilai kebudayaan materiel, dan imateriel.
 - b) Kualitas sumberdaya manusia/ahli untuk mengolah sumberdaya alam dan teknologi.
 - c) Muncul rangsangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam masyarakat.
 - d) Dinamika Penduduk atau Perubahan Sosia. Dinamika penduduk berkaitan dengan penambahan/penurunan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kematian (mortalitas), kelahiran (fertilitas), perpindahan (migrasi).
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal penyebab perubahan sosial :
- a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan tersebut dapat terbentuk melalui proses asimilasi (penggabungan beberapa budaya menjadi budaya baru), atau akulturasi (penggabungan beberapa budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya).
 - b) Peperangan. Peperangan yang muncul antar kelompok/antar negara dapat mengakibatkan perubahan sosial, karena pihak yang menang dalam peperangan memiliki keleluasaan untuk menguasai pihak yang kalah.

- c) Bencana Alam, dapat menyebabkan masyarakat di suatu wilayah harus berpindah tempat tinggal sehingga mengakibatkan perubahan sistem hidup dan perubahan struktural.

Perubahan sosial dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:³³

1) Berdasarkan Prosesnya

a) Perubahan yang direncanakan

Merupakan perubahan yang terorganisasi, pihak yang menginginkan perubahan melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk mewujudkan perubahan sosial di dalam masyarakat.

b) Perubahan yang tidak direncanakan

Terjadi diluar rencana/perkiraan masyarakat dan dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

2) Berdasarkan Waktunya

a) Perubahan secara cepat

Perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat dan mendasar. Perubahan ini diiringi dengan suatu konflik karena tidak semua masyarakat siap menerima.

b) Perubahan secara lamban

Tiga teori berkaitan dengan perubahan secara lambat / evolusi :

³³ Ibid.

- ✓ Unlinier Theories of Evolution, manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahap tertentu.
- ✓ Universal Theory of Evolution, perkembangan masyarakat tidak melalui tahap-tahap tertentu yang tetap.
- ✓ Multilinier Theories of Evolution, terdapat tahap-tahap perkembangan tertentu yang didapat melalui penelitian.

3) Berdasarkan Dampaknya

a) Perubahan kecil

Perubahan dalam lingkup sempit yang terjadi dalam masyarakat, hanya berdampak pada sebagian kecil masyarakat.

b) Perubahan Besar

Perubahan yang memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

4) Berdasarkan Caranya

a) Perubahan dengan kekerasan

Perubahan sosial yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan baik fisik maupun psikis demi tercapainya perubahan yang diinginkan.

b) Perubahan tanpa kekerasan

Perubahan yang dilakukan dengan jalan damai dan simpatik untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

BAB III

OPERASIONAL ALUR PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai suatu cara atau langkah untuk mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu, metode merupakan tujuan bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai tujuan yang maksimal.³⁴

Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan perbedaan pemberdayaan beda agama antara lembaga LMI (Lembaga Manajemen Infaq) sebagai perwakilan lembaga agama Islam dan DPP (Dewan Pastoer Paroki) sebagai perwakilan lembaga agama Kristen yang berada di Desa Klepu. Dua lembaga ini dijadikan acuan karena saat ini kedua lembaga tersebut sama-sama berkembang dan berjalan serta sama-sama menjadi pendamping ekonomi masyarakat di Desa Klepu.

³⁴ Anton Baker, *Metode Filsafah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Pada penelitian ini, keberadaan peneliti menjadi instrumen sekaligus pengumpul data. Sehingga kehadiran dan peran dari peneliti adalah sebagai partisipan penuh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi di sini karena beberapa pertimbangan dan alasan. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, bahwa alasan dan pertimbangan itu antara lain adalah Desa Klepu merupakan tempat yang saat ini menjadi banyak objek penelitian keagamaan, Desa klepu terkenal dengan desa yang masyarakatnya menganut dua agama yang sama-sama kuat bahkan berdasarkan keterangan kepala KUA Sooko Desa Klepu adalah tempat ibadah umat Kristen tertua di Asia Tenggara. Dan tidak kalah menarik di Desa ini terdapat dua lembaga besar yang berperan sebagai pendamping ekonomi masyarakat yakni LMI dan DPP.

BAB IV

PRAKTIK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MULTIKULTURAL BERBASIS LEMBAGA FILANTROPI KEAGAMAAN DI DESA KLEPU

A. Profil Desa Klepu

Desa Klepu berada di kabupaten Ponorogo bagian ujung timur (Kecamatan Sooko) yang berdekatan dengan Kabupaten Trenggalek. Desa Klepu mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan desa lain khususnya di Ponorogo. Salah satu ciri khas Desa Klepu adalah adanya tempat wisata atau tempat suci umat kristiani yang bernama sendang waloyo jatiningasih. Sendang Waloyo Jatiningasih ini ramai dikunjungi oleh masyarakat baik umat kristen maupun yang lainnya, khususnya para kaum muda.

Di Desa Klepu terdapat beberapa kebudayaan antara lain kesenian hadroh, kesenian musik lesung, tari reog, theg. Dari beberapa kebudayaan ini sebagian dilatar belakangi agama, dan sebagian bersifat umum, sehingga yang berperan juga berlatar belakang berbeda-beda. Hal yang tidak kalah menariknya adalah budaya Kecamatan Sooko khususnya Desa Klepu adalah budaya becekan³⁵, sejarah³⁶ dan yang paling unik adalah saat

³⁵ Suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan. Dimana secara hukum adat orang yang pernah disumbang wajib mengembalikan ketika yang menyumbang juga mempunyai hajat dengan barang yang sejenis dengan nilai yang sama.

umat Islam melakukan kundangan mereka yang tidak melaksanakan dan meyakini budaya ini ikut dalam acara ini, bahkan non muslim pun juga datang untuk mengikuti kegiatan ini.

1. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Klepu

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan juga wawancara, peneliti mendeskripsikan kondisi ekonomi masyarakat Desa Klepu bervariasi. Namun secara umum ekonomi masyarakat Desa Klepu adalah menengah ke bawah. Hal ini didukung karena mayoritas mata pencaharian mereka adalah buruh tani dan petani. Meski demikian ada sebagian masyarakat yang menengah ke atas atau bisa dikatakan mampu. Rata-rata mata pencaharian mereka adalah guru, pengusaha dan pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan hasil survey membuktikan secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai orang kaya, karena mayoritas penduduk Desa Klepu anggota keluarganya ada yang bekerja sebagai TKI.³⁷

Gaya hidup masyarakat sekitar (khususnya yang terlibat pemberdayaan) yang semakin bertambah konsumtif (mewah), hal ini dapat dilihat salah satunya

³⁶ Sejarah adalah silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri/hari raya umat kristen yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua, dengan berjalan kaki bersama-sama dan mengelilingi minimal lingkungannya sendiri. Kebiasaan ini juga dilakukan ketika sanak saudara umat lain hari raya. Misalnya umat kristen hari raya warga muslim juga ada yang ikut merayakan/sejarah.

³⁷ Partomo, wawancara dan observasi di Desa Klepu Sooko pada 11 September 2016, 15:00 WIB.

pada anggaran kebutuhan tersier yang semakin terpenuhi, awalnya masyarakat sebelum adanya pemberdayaan ini hanya mendapatkan penghasilan dari hasil kerja dan panen namun setelah adanya pemberdayaan penghasilan mereka semakin meningkat dan mampu membeli kebutuhan perlengkapan (tersier), merasa lebih ringan membiayai biaya pendidikan anak mereka bahkan membelikan kendaraan untuk transportasi sekolah. Selain itu, masyarakat yang biasanya mendapatkan bahan makanan langsung dari ladang, setelah mendapatkan tambahan penghasilan lebih sering mendapat bahan makan membeli di pasar/tukang sayur.

Implikasi pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat multikultural di Desa Klepu adalah peningkatan penggunaan trad teknologi yang semakin berfariatif. Hal ini ditandai dengan hand phone anak mereka/masyarakat semakin ugrate, bahkan mulanya tidak mempunyai namun setelah adanya pemberdayaan ekonomi mayoritas menjadi punya. Meskipun pada awalnya kebutuhan semacam ini adalah kebutuhan yang sangat urgent untuk komunikasi baik dengan pengurus maupun dengan sesama masyarakat. Dalam hal teknologi seperti halnya yang dijelaskan di atas, bahwa kendaraan juga semakin meningkat, bahkan melebihi batas kebutuhan pokoknya. Hal demikian alasan awal adalah agar mudah mengangkut pakan peternakan, mudah dalam penyeteran hasilnya, bahkan hal ini juga dirasakan dan dialami oleh pengurus/penanggung jawab

program pemberdayaan yang mana mereka harus menyetorkan hasil ketempat yang sangat jauh.

Pemberdayaan ekonomi dalam hal materi/material, juga terkena implikasinya. Hal ini terbukti bahwa masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan dan kebetulan tanggungan hidup mereka lebih ringan (tidak memikirkan anak sekolah, tidak mempunyai hutang) mereka cenderung fokus pada pembenahan materi (rumah, mobil, tanah dll) yang mereka punya.

Adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI pengangguran yang ada di masyarakat Desa Klepu menjadi berkurang, hal ini ditandai dengan hal-hal kecil seperti para buruh petani yang hanya mengandalkan pekerjaan dari panen (diuar panen menganggur) namun saat ini setelah adanya pemberdayaan ini masyarakat setiap harinya mempunyai aktifitas rutin (pengelolaan program). Selain hal itu berkurangnya pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan ditandai dengan berkurangnya angka masyarakat yang menjadi TKW/TKI, yang biasanya menjadi trend khususnya di wilayah Sooko.

Sedangkan implikasi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh DPP sebagai lembaga filantropi dalam sosial ekonomi tidak jauh berbeda dengan LMI, hal ini menurut peneliti karena hukum alam dan juga hukum yang wajar bagi seorang manusia. Selain itu memang kultur dan budaya antara masyarakat Desa Klepu sama, sehingga perubahan satu individu akan mempengaruhi individu lain begitu seterusnya. Perubahan sosial

ekonomi yang ditimbulkan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain:³⁸

- 1) Masyarakat Desa Klepu tidak merasa bingung khususnya hal pangan, karena adanya lumbung yang mereka kelola, akan tetapi mereka khawatir saat masa panen mereka sedikit terancam akibat faktor alam.
- 2) Masyarakat tidak hanya mengandalkan musim panen saja dalam pencaharian (mencari uang), namun dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP dapat mengisi waktu luang mereka saat tidak musim panen.
- 3) Perekonomian masyarakat yang meningkat. Hal ini ditandai banyak hal seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas oleh peneliti.
- 4) Solidaritas dan kerukunan antar umat beragama selalu terjalin, hal ini disebabkan dari lingkungan mereka yang mayoritas berbisnis/berwira usaha sehingga kebiasaan masyarakat Desa dimana bertemu mereka akan tukar pikiran dan pengalaman hasil pengelolaan program mereka.

Perubahan secara sosial ekonomi hampir sama dari kedua lembaga dikarenakan kultur budanya dan geografis yang sama. Namun perbedaannya dari perubahan sosial ini adalah LMI lebih dibatasi oleh aturan yang ada di dalam al-Qur'an sedangkan implikasi DPP terhadap masyarakat cenderung lebih umum, dan

³⁸ Prapto, wawancara, Dusun Tanjung Desa Sooko Kecamatan Sooko, Selasa 04 September 2016 12:30 WIB.

selalu membiasakan untuk selalu menyisihkan penghasilnya untuk masyarakat yang lain..



BAB V
PENDIALOGKAN KONSEP DAN PRAKTIK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA FILANTROPI
KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL DESA KLEPU

**A. Strategi dan Model Pendekatan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Multikultural Berbasis
Lembaga Filantropi Keagamaan Di Desa Klepu**

Dalam bab ini akan mengulas dan mendialogkan anatara praktik pemberdayaan yang ada di Desa Klepu dengan teori yang telah dipaparkan di atas. Agar lebih mudah dan fokus mendialogkan keduanya, maka pembahasan dibagi menjadi dua sub bab yang membahas strategi masing-masing lembaga dan pendekatan pemberdayaan yang digunakan oleh lembaga filantropi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural di desa Klepu, serta implikasi pemberdayaan ekonomi terhadap perubahan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pendialogkan/analisa yang dilakukan seperti halnya pendapat Bogdan dalam Sugiono, bahwa analisa yang dilakukan yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh peneliti sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Berbasis Lembaga Filantropi Keagamaan Di Desa Klepu

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi tentu ada sebuah tujuan atau visi dan misi. Dalam meraih tujuan tentu diperlukan adanya sebuah cara yang sering disebut dengan strategi dan dengan model pendekatan. Berikut akan diulas mengenai strategi yang dilakukan oleh lembaga filantropi dan model pendekatan yang diterapkan serta pendialokan praktik yang ada dengan konsep yang sesungguhnya.

a. Strategi lembaga filantropi Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural di Desa Klepu

Hal tersebut sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh Cholisin dengan teori dan hasil karyanya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat”, bahwa aparat pemerintah saat ini mengembangkan program pembangunan ekonomi perdesaan yang mencanangkan dalam beberapa program yaitu pembangunan pertanian, industrialisasi pedesaan, pembangunan masyarakat desa terpadu, dan strategi pusat pertumbuhan. Sehingga dari pemerintah dan lembaga LMI ketika saling berkoordinasi dan komunikasi pasti akan sangat mudah dalam mewujudkan tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebuah kemandirian ekonomi.

b. Strategi lembaga filantropi Dewan Pastoer Paroki (DPP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural di desa Klepu

Disisi lain lembaga DPP telah tepat dalam tindakan yang dilakukan bahwa dalam program pemberdayaan ekonomi dibidang tanaman organik yang kurang maksimal segera mengalihkan fokus program pemberdayaan dengan tidak putar balik program (mengubah total program), tetapi mencari celah program tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu dalam program lumbung pangan dan peternakan babi.

Dari pemaparan kedua strategi lembaga filantropi di atas, maka secara global dapat penulis katakan strategi yang digunakan oleh lembaga LMI bersifat demokratis/kerakyatan, sedangkan strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat multicultural yang dilakukan DPP di desa Klepu bersifat terpusat, yakni pengurus DPP sangat menentukan perannya.

2. Model Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Desa Klepu

Dalam model pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan di desa Klepu, memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Dimungkinkan faktor inilah yang mempengaruhi proses pengelolaan program pemberdayaan dan tingkat keberhasilan kedua lembaga. Agar lebih spesifik dan lebih jelas model pendekatan pemberdayaan masing-masing lembaga, akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

a. Model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural oleh Lembaga

Menejemen Infaq (LMI) sebagai lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu

Pada temuan data yang diperoleh dari lapangan, model pendekatan pemberdayaan lembaga filantropi keagamaan (LMI) tidak dijelaskan secara spesifik. Akan tetapi, model pendekatan pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Menejemen Infaq (LMI) dapat ditemukan dan difahami dari penjelasan penulis yang didapatkan dari narasumber yang berkompeten (memahami secara keseluruhan). Model pendekatan menurut Natalia Artha Malau, dalam karyanya yang berjudul, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dijelaskan model pendekatan pemberdayaan ada dua, yaitu pendekatan dari atas kebawah (top down) atau sering disebut model tetesan dari atas (trickle down) dan model pendekatan dari bawah (bottom up).

Secara umum pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LMI adalah menggunakan pendekatan dari bawah (bottom up). Memang awal mula model pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LMI embrionya adalah pendekatan pendekatan dari atas kebawah (top down) atau sering disebut model tetesan dari atas (trickle down), hal ini dilakukan oleh lembaga LMI hanya sebuah gagasan awal yang mendorong kegiatan program pemberdayaan ekonomi pada msyarakat multikultural di Desa Klepu.

Setelah gambaran dan pemetaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan LMI menemukan titik terang terkait program ke depan,

lembaga filantropi ini lebih cenderung memancing masyarakat yang aktif dari pada pengurus LMI (baik cabang Ponorogo hingga pusat). Selain hal ini, dalam tahap awal masalah pendanaan juga memakai sistem ini, dikarenakan memang masyarakat adalah objek yang digerakkan dan pemberdayaan bukan berbasis aset desa.

Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan LMI secara umum lebih cenderung pendekatan dari bawah (bottom up) dapat diketahui berdasarkan beberapa penjelasan penulis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, antara lain:

- 1) Masyarakat Desa Klepu sejak awal selalu dilibatkan baik pembentukan pengurus lapangan/penanggung jawab. Dalam hal ini memang posisi masyarakat lebih menguasai pengetahuan potensi-potensi wilayah yang ada. Mulai dari kesepakatan program sampai dengan pemasaran dan pelaporan.
- 2) Masyarakat terlihat lebih aktif dan dari hari ke hari semakin mandiri. Pada hal ini sangat terlihat saat masyarakat diberikan keleluasaan dan diberikan tanggung jawab atas pelaporan hasil program yang dijalankan. Selain hal ini, masyarakat juga

Berdasarkan model pendekatan yang digunakan lembaga filantropi LMI pendekatan dari bawah (bottom up) memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan-keunggulan itu adalah:

- a) Program pemberdayaan dapat dipilih secara tepat.
- b) Masyarakat sebagai pelaku tidak hanya sebagai wayang (objek yang digerakkan), sehingga mereka

- lebih merasa memiliki programnya, sedangkan pengurus LMI posisinya adalah sebagai pendamping.
- c) Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan akan lebih mencapai tujuannya yaitu masyarakat yang mandiri dan berdaya.
 - d) Masyarakat lebih pandai dalam mengatasi permasalahan mereka, karena masyarakat diharapkan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi secara individu (bersifat ringan) terlebih dahulu.
 - e) Pengetahuan masyarakat semakin berkembang dan semakin luas, karena masyarakat diberikan kebebasan dalam mencari pakan maupun dalam hal pemasaran.

Meskipun banyak hal positif terhadap model pendekatan yang dilakukan oleh LMI namun, ada beberapa kelemahan/kekurangan dalam menerapkan model ini. Kelemahan atau kekurangan itu antara lain perkembangan masyarakat terkadang kurang terarah dan sulit dikondisikan, sehingga menyulitkan pengurus LMI dan juga pengurus lapangan dalam pelaporan. Perkembangan masyarakat yang berjalan lambat karena masyarakat dalam mengembangkan programnya harus mendalami dan memecahkan permasalahan sendiri.

Berdasarkan keunggulan dan juga kekurangan model pendekatan yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural, menurut penulis model ini lebih cocok dan sesuai diterapkan. Karena tujuan pemberdayaan benar adanya dan mudah untuk dicapai.

b. Model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural oleh Dewan Pastoer Paroki (DPP) sebagai lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu

Model pendekatan yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan DPP dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada masyarakat multi cultural tidak berbeda jauh dengan Lembaga Manajemen Infaq (LMI), akan tetapi model pendekatan yang dilakukan kebalikan dari LMI. DPP dalam pemberdayaan secara rinci juga tidak dijelaskan oleh peneliti dalam paparan data yang ditemukan dari hasil obserfasi dan wawancara, akan tetapi dalam penjelasan strategi yang digunakan oleh lembaga filantropi ini (DPP) dapat tergambar secara jelas.

Sesuai yang penulis jelaskan, bahwa model pendekatan yang dilakukan oleh DPP adalah kebalikan dari LMI sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari atas kebawah (top down) atau model tetesan dari atas (trickle down). Pendekatan ini dapat diketahui berdasarkan praktek dalam tahapan dan strategi yang digunakan oleh DPP antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam penentuan program pengurus DPP lebih dominan dan bahkan tidak melibatkan masyarakat, masyarakat tinggal menerima putusan hasil musyawarah yang dilakukan oleh pengurus DPP.
- 2) Dalam prakteknya, pengurus DPP ikut berperan aktif baik dalam pelaksanaan, pengelolaan maupun pelaporan/evaluasi. Bahkan dalam hak pemasaran telah terkonsep oleh pengurus DPP.

- 3) Saat program kurang sesuai dan kurang berhasil yang menyelesaikan dan mencari solusi adalah pengurus DPP. Seperti saat program pertanian yang mereka lakukan kurang maksimal maka program diialihkan oleh pengurus DPP.
- 4) Dalam hal pendanaan yang digunakan dari awal sampai akhir dilakukan dan diusahakan ditanggung oleh pengurus DPP, masyarakat dalam hal ini sebagai objek.

Seperti halnya lembaga filantropi keagamaan LMI, lembaga filantropi ini (DPP) juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Keuntungan dalam menggunakan pendekatan dari atas kebawah (top down) antara lain:

- a) Kegiatan program pemberdayaan mudah digerakkan, karena dalam model ini hampir mirip seperti dalam kegiatan perlombaan, yang mana masyarakat adalah peserta lomba sedangkan pengurus DPP adalah sebagai panitia penyelenggara. Oleh karena itu peserta dalam perlombaan (masyarakat) akan mengikuti kebijakan panitia penyelenggara (pengurus DPP).
- b) Masyarakat tidak perlu berfikir arah kedepan, karena semua konsep dan planning ke depan telah dilakukan oleh DPP. Sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas lain.

Sedangkan kekurangan dari penerapan model pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP antara lain:

- a) Masyarakat cenderung pasif, sehingga tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Klepu sedikit terkendala.
- b) Monopoli hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural akan lebih mudah dilakukan, saat pengurus DPP kurang bertanggung jawab.
- c) Pengetahuan masyarakat yang sulit berkembang, hal ini disebabkan karena pengurus DPP yang lebih dominan dalam mengatur strategi pemberdayaan. Bahkan dalam penyelesaian permasalahan pengurus DPP lebih aktif dibandingkan dengan masyarakat.
- d) Masyarakat hanya seperti wayang yang digerakkan. Sehingga gerak masyarakat tergantung oleh pengurus DPP, ketika pengurus DPP diam maka masyarakat cenderung pasif.

Berdasarkan uraian tentang model pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP, pendapat penulis terkait hal ini bahwa model pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural yang digunakan oleh lembaga DPP sudah tepat, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai. Bahkan menurut hemat pengamatan dari panulis antara kelebihan dan kekurangan pendekatan pemberdayaan yang digunakan oleh DPP cenderung banyak kekurangannya. Sehingga dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP akan lebih lama mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan, yaitu kemandirian ekonomi atau mendayagunakan masyarakat.

Apabila model pendekatan pemberdayaan yang digunakan oleh LMI dan DPP sebagai lembaga filantropi

keagamaan dibandingkan maka menurut penulis pendekatan yang diterapkan masing-masing lembaga sudah sangat bagus semuanya, akan tetapi menurut analisa penulis model pendekatan yang paling dominan atau lebih besar keuntungannya adalah dengan pendekatan dari bawah (bottom up). Dengan alasan telah diuraikan pada keuntungan dari model pendekatan di atas, dan yang paling penting adalah proses pencapaian tujuan segera mungkin, yaitu mewujudkan ekonomi masyarakat yang mandiri.

B. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Multikultural Berbasis Lembaga Filantropi Keagamaan Di Desa Klepu

Implikasi dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan dapat diketahui salah satunya dengan melihat perubahan sosial dan kemandirian ekonomi yang ada di Desa Klepu. Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai implikasi pemberdayaan secara sosial dan juga berdasarkan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya masyarakat multikultural desa Klepu.

1. Implikasi perubahan sosial dari pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural berbasis lembaga filantropi di Desa Klepu

Tujuan dari sebuah pemberdayaan salah satunya adalah pada mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun dalam hal pemberdayaan tentunya akan mempengaruhi banyak hal. Antara lain adalah perubahan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan tingkat

kemandirian ekonomi. Perubahan-perubahan itu akan dialami dan di ketahui sejauh mana yang dialami oleh masyarakat.

a. Perubahan Sosial Keagamaan

Agar lebih mudah menganalisa perubahan sosial keagamaan maka peneliti mengelompokan perubahan ini pada masing-masing lembaga. Perubahan sosial keagamaan yang ditimbulkan akibat pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan LMI yaitu:

- 1) Masyarakat mudah dan ringan dalam mengadakan kegiatan keagamaan khususnya dalam hal pendanaan (iuran). Hal ini disebabkan karena motivasi dan pengarahan yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan.
- 2) Pembangunan/renovasi tempat ibadah semakin bertambah. Masyarakat sering berkumpul dengan tokoh agama (pengurus lapangan), sehingga materi-materi keagamaan sering didapatkan.
- 3) Gotong royong, kerukunan, dan kebersamaan (ukhuwah) semakin erat.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga filantropi juga mempunyai implikasi secara tidak langsung terhadap sosial keagamaan, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat ketenangan dalam beribadah semakin meningkat, hal ini dapat terjadi karena seseorang beribadah kurang tenang saat kondisi ekonominya tidak stabil. Sebaliknya, seseorang lebih *k>usu*' dalam beribadah ketika beban ekonominya ringan.

- 2) Keagamaan mereka mudah dikontrol, dan diperhatikan karena sering adanya ikatan secara personal dan emosional.
- 3) Membuktikan integritas agama Islam di Desa Klepu semakin kuat.
- 4) Motifasi dan realisasi untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 semakin mudah.

Perubahan sosial keagamaan seperti halnya diulas di atas, hal yang wajar dan terjadi dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, Soemardjan menjelaskan perubahan yang ditimbulkan dari pemberdayaan salah satu cirinya adalah minimal adanya perubahan yang mencakup material/spiritualnya saja tapi mencakup keduanya. Perubahan sosial keagamaan yang ditimbulkan akibat pemberdayaan ekonomi, faktor yang paling dominan adalah dipengaruhi karena faktor internal. Faktor internal dari penjelasan Soemardjan yang dominan adalah faktor dari individu (masyarakat) yang sungguh-sungguh karena merasa memiliki programnya, selain itu didukung oleh sumber daya manusia dari pengurus yang sangat memadai.

Sedangkan dilihat dari jenis perubahan yang terjadi berdasarkan prosesnya tergolong pada perubahan yang direncanakan. Apabila dilihat dari jenis waktunya perubahan ini adalah pada jenis perubahan yang cepat. Sedangkan berdasarkan jenis dampaknya perubahan ini adalah perubahan dengan dampak besar, karena masyarakat desa klepu baik langsung atau tidak langsung memberikan efek terhadap masyarakat yang ada di Desa Klepu.

Sedangkan implikasi secara langsung akibat pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP kepada masyarakat secara singkat adalah sebagai berikut:

- a) Para jamaat merasa diperhatikan oleh lembaga keagamaan sehingga mereka semakin giat dalam sembahyang ke gereja.
- b) Ikatan persaudaraan dan kekeluargaan masyarakat semakin kuat. Bahkan mereka ingin membantu siapa saja (tenaga) yang membutuhkan bantuan mereka khususnya masyarakat desa Klepu.

Implikasi pemberdayaan ekonomi lembaga filantropi DPP secara tidak langsung yaitu:

- 1) Mampu mengikat keyakinan mereka dalam meyakini agama Kristen. Karena lembaga ini berbasis agama tentunya visi dan tujuan utama mereka adalah pada agama mereka, begitu juga yang dilakukan oleh DPP.
- 2) Secara tidak langsung hal yang dilakukan lembaga filantropi mengajarkan kepada umatnya untuk saling berempati dan simpati kepada masyarakat, khususnya sesama Kristen.

Secara tersirat perubahan yang ditimbulkan akibat pemberdayaan masyarakat desa Klepu tidak jauh berbeda dengan lembaga LMI, namun dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP perlu kiranya meningkatkan strateginya untuk mengembangkan program yang tersusun baik. Perubahan sosial keagamaan seperti halnya diulas di atas. Perubahan sosial keagamaan yang ditimbulkan akibat pemberdayaan ekonomi, faktor yang paling dominan adalah dipengaruhi karena faktor internal.

Faktor internal dari penjelasan Soemardjan yang dominan adalah faktor dari pengurus DPP yang sungguh-sungguh karena merasa memiliki programnya, selain itu didukung oleh sumber daya manusia dari pengurus yang sangat memadai. Namun sedikit kelemahan bahwa DPP kurang melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan.

Sedangkan dilihat dari jenis perubahan yang terjadi berdasarkan prosesnya tergolong pada perubahan yang direncanakan. Apabila dilihat dari jenis waktunya berdasarkan perbandingan dengan usia LMI yang jauh lebih muda, perubahan ini adalah pada jenis perubahan yang lamban. Karena DPP sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya LMI dibentuk. Sedangkan berdasarkan jenis dampaknya perubahan ini adalah perubahan dengan dampak kecil, karena masyarakat Desa Klepu hanya sebagian yang merasakan dan berperan dalam pemberdayaan.

b. Perubahan Sosial Ekonomi

Perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lembaga filantropi dikelompokkan berdasarkan lembaga filantropi masing-masing seperti halnya pada perubahan sosial keagamaan. Agar mudah dalam menganalisa dan mendialogkan konsep/teori perubahan sosial ekonomi dan praktik dilapangan maka, perlu diterangkan kembali secara singkat praktik yang ada di lapangan. Implikasi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga filantropi LMI dalam perubahan sosial ekonomi secara singkat adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang meningkat.

- 2) Gaya hidup masyarakat sekitar (khususnya yang terlibat pemberdayaan) yang semakin bertambah konsumtif (mewah), hal ini dapat dilihat salah satunya pada anggaran kebutuhan tersier yang semakin terpenuhi.
- 3) Peningkatan penggunaan trend teknologi yang semakin bervariasi.
- 4) Pemberdayaan ekonomi dalam hal materi/material, juga terkena implikasinya.
- 5) Berkurangnya angka pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI pengangguran yang ada di masyarakat berkurang, hal ini ditandai dengan hal-hal kecil seperti para buruh petani yang hanya mengandalkan pekerjaan dari panen (diluar panen menganggur) namun saat ini setelah adanya pemberdayaan ini masyarakat setiap harinya mempunyai aktifitas rutin (pengelolaan program).

Sedangkan implikasi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh DPP sebagai lembaga filantropi dalam sosial ekonomi tidak jauh berbeda dengan LMI. Implikasi-implikasi yang timbul akibat pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP yaitu:

- 1) Masyarakat desa Klepu tidak merasa bingung khususnya hal pangan, karena adanya lumbung yang mereka kelola, akan tetapi mereka khawatir saat masa panen mereka sedikit terancam akibat faktor alam.
- 2) Masyarakat tidak hanya mengandalkan musim panen saja dalam pencaharian (mencari uang), namun

dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh DPP dapat mengisi waktu luang mereka saat tidak musim panen.

- 3) Perekonomian masyarakat yang meningkat. Hal ini ditandai banyak hal seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas oleh peneliti.
- 4) Solidaritas dan kerukunan antar umat beragama selalu terjalin, hal ini disebabkan dari lingkungan mereka yang mayoritas berbisnis/berwirausaha sehingga kebiasaan masyarakat desa di mana bertemu mereka tukar pikiran dan pengalaman hasil pengelolaan program mereka.

Berdasarkan paparan perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pemberdayaan lembaga filantropi maka peneliti menganalisa bahwa kedua lembaga ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa khususnya dalam sosial ekonomi. Perubahan sosial keagamaan yang ditimbulkan akibat pemberdayaan ekonomi, seperti halnya ulasan di atas, bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam program pemberdayaan khususnya dalam bidang sosial ekonomi adalah faktor internal.

Perubahan sosial yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis agama, yaitu perubahan sosial khususnya dalam bidang ekonomi masyarakat bahwa masing-masing lembaga memiliki implikasi positif yang luar biasa. Namun dalam segi perbedaan dan koreksi bahwa lembaga filantropi LMI dengan lembaga filantropi DPP lebih memiliki implikasi lebih kuat LMI dibandingkan dengan DPP, meskipun implikasi ini perbedaannya sangat tipis.

2. Implikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat multikultural di Desa Klepu dalam kemandirian ekonomi masyarakat

Puncak dan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pada masyarakat multikultural di Desa Klepu tidak lain adalah tercapainya kemandirian ekonomi. Kemandirian ini dapat dilihat dari beberapa hal, meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian ekonomi yang dikelola oleh LMI di Desa Klepu secara singkat dapat diketahui dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Kemandirian/kemampuan masyarakat Desa Klepu dalam berfikir kritis dalam segala hal, khususnya dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Mayoritas masyarakat Desa Klepu tingkat berfikirnya bagus, namun dalam hal pemberdayaan ekonomi seperti program usaha mereka masih sedikit berkurang karena terlalu banyak pertimbangan dan takut dari sebuah resiko. Dalam hal ini masyarakat telah melakukan sebuah kemandirian yang mana masyarakat sudah mau dan ingin memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI.

Salah satu contoh dalam hal ini adalah saat masyarakat awal ingin mengikuti program pemberdayaan, masyarakat masih ragu akan hasil yang diperolehnya, dan apakah mereka mampu untuk melakukan kegiatan dalam pemberdayaan. Contoh lain adalah saat masyarakat berkeinginan untuk

mencarikan alternatif pakan yang mereka gunakan untuk memberikan makanan pada ayam mereka.

- b. Dalam setiap menemukan sebuah permasalahan, masyarakat diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya problem, sampai pada titik akhir penyebab permasalahan belum bisa ditemukan dan cara mengatasinya pun juga belum menemukan, maka masyarakat harus segera melaporkan hal ini kepada pengurus/penanggung jawab. Kasus seperti ini misalnya ayam beerhari-hari tidak bertelur dan ayam mengalami stres akibat petir/akibat kejadian lain, masyarakat menemukan cara mengatasinya yaitu disamakan dengan peternakan bebek bahwa ayam harus sering diputar suara yang lumayan keras misalnya seperti diputar musik.

Perubahan kemandirian ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Klepu, secara tidak langsung faktor perubahan konatif masyarakat tidak statis dan justru mengalami pergerakan/berfungsi.

- c. Melihat perkembangan pemberdayaan di desa Klepu semakin berkembang maka masyarakat mengusulkan kepada LMI untuk menambah program yang ada. Berdasarkan keterangan dari ketua pengurus (lapangan), agenda terdekat adalah mengajak masyarakat membuat pakan ayam sendiri, selain itu akan diadakannya program tambahan terkait dengan program pembuatan tempe (menggunakan teknologi).
- d. Dari beberapa peserta ada sebagian yang berasal dari mualaf dan mayoritas mereka orang awam, beberapa dari mereka berunding dan bermusyawarah

mengadakan pertemuan rutin guna saling tukar pengalaman dan controlling pengelolaan ayam petelur yang mereka lakukan. Hal ini ditanggapi oleh pengurus bahkan dalam pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemanan dan hanya membahas pemberdayaan ekonomi, namun dari pengurus juga mengadakan kajian keagamaan guna meningkatkan aqidah Islamiyah mereka.

Berdasarkan uraian-uraian perubahan yang dialami oleh masyarakat multikultural khususnya di desa Klepu lembaga filantropi LMI menurut pengamatan dan paradigma penulis, secara garis besar kemandirian ekonomi masyarakat telah memenuhi kriteria sebagai indikator dan ciri-ciri kemandirian ekonomi yang dilakukan oleh LMI.

Selain beberapa hal tentang kemandirian ekonomi yang dilakukan oleh LMI, kemandirian ekonomi juga dilakukan oleh lembaga DPP, yang mana tidak kalah bagusnya dari LMI. Hal ini dapat diketahui dengan beberapa penjelasan berikut ini:

DPP telah memprogram beberapa produk kegiatan mereka, sehingga beberapa hal resiko dan dampak yang kurang bagus telah diantisipasi sedemikian rupa. Meskipun demikian sebuah kegiatan ketika dilaksanakan dan tidak menemui masalah rasanya sangat kurang sempurna. Di sinilah kemandirian masyarakat Klepu (yang mengikuti program DPP) mulai mandiri/berdaya. Mereka selalu sigap dan bijak dalam menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya seperti kasus peternakan beberapa tahun yang lalu, pembuangan limbah babi

dibuang di sungai besar, yang mana sungai itu ternyata digunakan sebagian besar untuk MCK. Ketika kotoran/limbah dibuang ke sungai maka masyarakat merasakan gatal-gatal dan air sungai semakin tercemar.

Kejadian ini sempat menjadi sorotan publik, bahkan melibatkan Muspika Kecamatan Sooko. Dalam penyelesaian ini DPP dan juga pengurus gereja dipertemukan dengan para tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat untuk bermusyawarah.

Menurut teori pemberdayaan, seharusnya yang bertindak dan menemukan solusi adalah dari masyarakat sendiri, hal ini dilakukan dengan alasan agar masyarakat secepatnya menuju tujuan pemberdayaan ekonomi yaitu sebuah kemandirian khususnya bidang ekonomi. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat telah berusaha mencari solusi dan musyawarah, tetapi kemufakatan belum berada pada titik tengah dari masing-masing masyarakat, sehingga titik akhir harus melibatkan tokoh masyarakat, agama dan aparat.

Selain hal di atas, ada upaya lain yang mengasah kemandirian masyarakat Desa Klepu dengan berfikir aktif. Ketika adanya perputaran lumbung padi/lumbung pangan yang terkendala saat pembayaran dikarenakan hasil panen mereka yang kurang baik. Beberapa masyarakat akhirnya segera bermusyawarah dan mencari penyebab hal yang menjadikan hasil panen mereka kurang bagus, akhirnya dari beberapa masyarakat melakukan penyelidikan dan pengamatan menemukan sebabnya kemudian mereka bermusyawarah dan mencoba membuat obat penangkal virus padi mereka bersama-

sama. Hasil yang di dapatkan ternyata lumayan bagus, karena dalam musyawah itu ada yang memberikan solusi bahwa urin dari hewan ternak mereka dapat dijadikan sebagai obat alami yang membuat tanaman mereka menjadi subur.

Selain itu berdasarkan keterangan dari pengurus DPP bahwa mereka juga mengusulkan adanya sebuah pertemuan dan perkumpulan rutin sebagai wadah diskusi, pengontrolan asset dan sebagai salah satu cara untuk mempererat kekeluargaan mereka.

Beberapa program yang menjadi andalan dan fokus program DPP ini sudah berjalan cukup lama (lebih dari 2 tahun), program dan kegiatan yang dilakukan semakin hari semakin baik, bahkan asset mereka semakin meningkat. Hingga beberapa bulan ke depan rencana membuat sebuah koperasi yang dapat mengcover kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa Klepu.

Ulasan-ulasan di atas menggambarkan dan membuktikan secara jelas, bahwa DPP dalam hal pemberdayaan memang benar-benar ingin meraih kemandirian ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Desa Klepu. Berdasarkan indikator kemandirian ekonomi yang dikemukakan oleh Ambar Teguh Sulistiyani, maka menurut penulis lembaga filantropi keagamaan (DPP) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang multikultural telah berjalan dengan sangat bagus, namun harus ada sedikit pembenahan dan penyempurnaan dalam melibatkan masyarakat agar lebih bergerak dan terlibat dengan sepenuhnya.

Dari dua uraian tentang kemandirian ekonomi yang dihasilkan dari pemberdayaan ekonomi kedua lembaga filantropi sama-sama memenuhi konsep dalam kemandirian baik secara berfikir (mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik), bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Masing-masing lembaga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas keunggulan yang dimiliki oleh lembaga LMI adalah masyarakat digerakan/diharapkan lebih berperan aktif dari pada pengurus sementara posisi pengurus hanya sebagai jalan tengah dan pendamping berjalannya pengelolaan program dalam mencapai tujuan kemandirian ekonomi. Sementara keunggulan dari DPP, lembaga filantropi lebih aktif dalam pendampingan (kedekatan personal lebih dominan), sehingga sejauhmana kemampuan dan usaha masyarakat lembaga selalu mengetahui dan selalu siap ketika masyarakat membutuhkannya. Sedangkan kekurangan dari masing-masing lembaga salah satunya adalah kebalikan dari keunggulan yang telah disebutkan.

Dalam kemandirian ekonomi yang dipaparkan pada bab sebelumnya ada beberapa asset yang dimiliki masing-masing lembaga. Dalam hal ini penulis paparkan berdasarkan klasifikasi jenis asset sebagai berikut:

Tabel 5.1
Perbandingan Aset LMI Dan DPP

No	Asset	LMI	DPP
1	Pengetahuan	Masing-masing pengurus LMI lapangan mempunyai pengetahuan yang tinggi (sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sebagai guru pendidikan).	Tidak semua pengurus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi (sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sebagai guru pendidikan), akan tetapi sebagian dari kalangan masyarakat.
2	Transportasi	Mempunyai 1 unit mobil sebagai pengangkut hasil program pemberdayaan	-
3	Perumahan/gedung	1 gedung pertemuan (serbaguna)	Memiliki tempat ibadah, rumah Dewan Poastoer/Dewan Gereja/aula dan tempat wisata
4	Sumber Air	-	Program sudah tinggal

			menjalankan
5	Alat-alat produksi	1 mesin penggilingan pakan ternak	-
6	Program pemberdayaan	Induk ayam petelur tidak kurang dari 1000 ekor	Babi tidak kurang dari 500 ekor, lumbung padi kurang lebih 8 ton.
7	jaringan sosial	Facebook, blogger	-
8	Sumber pendanaan	pengurus LMI pusat dan masyarakat	DPP seatasnya hingga sampai pusat, dari masyarakat.

Dari beberapa klasifikasi aset dua lembaga flantropi maka dapat diketahui bahwa masing-masing lembaga filantropi dalam melakukan pengembangan aset yang berimbas pada program-program pemberdayaan ekonomi. Mereka saling berlomba-lomba dan mencari celah antar program yang mereka lakukan, program yang mereka lakukan dapat dikatakan tidak ada yang sama persis. Dari hal ini opini/hipotesa awal yang penulis sampaikan terbukti bahwa meskipun kedua lembaga berjalan beriringan untuk kemandirian ekonomi masyarakat Desa Klepu, dari asset yang terpaparkan di atas sangat jelas bahwa pemberdayaan ini ada unsur persaingan dalam mengembangkan program mereka. Namun dengan pemaparan data kedua lembaga di atas

dapat mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari asset serta mengetahui kebutuhan yang lembaga butuhkan untuk terciptanya tujuan pemberdayaan ekonomi.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi dalam kemandirian ekonomi juga dapat diketahui dengan melihat seberapa besar kontribusi masing-masing lembaga dalam menangani/memberdayakan masyarakat desa klepu. Target masing-masing lembaga dalam program pemberdayaan ini adalah semua masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah (kurang mampu). Jumlah masyarakat desa Klepu yang tergolong dalam kriteria ini berdasarkan data desa dan pendapat Kepala Desa Klepu sejumlah 489 orang. Jumlah yang telah diberdayakan lembaga LMI sejumlah 53 orang. Sedangkan lembaga DPP sejumlah 76 orang. Sehingga prosentase masyarakat yang telah digarap lembaga LMI sebesar $10,9\% (53 \cdot 100 : 489)$ sedangkan DPP sebesar $15,6\% (76 \cdot 100 : 489)$. Dari perbandingan jumlah ini sesungguhnya target dari masing-masing lembaga untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah masih harus banyak peningkatan.

Dari pemaparan kemandirian ekonomi diatas maka benang merah yang dapat penulis tarik adalah kedua lembaga filantropi sama-sama memenuhi kriteria, indikator dan ciri-ciri maupun konsep kemandirian ekonomi, baik secara berfikir (kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik), bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Namun, menurut penilaian peneliti

berdasarkan paparan dan ulasan di atas lembaga filantropi DPP dalam memberdayakan ekonomi sebenarnya sudah berjalan sangat bagus, tetapi harus ada sedikit pembenahan dan penyempurnaan dalam melibatkan masyarakat agar masyarakat lebih bergerak dan terlibat dengan sepenuhnya.

Selain beberapa penemuan dan pendialogkan antara teori dan praktik pemberdayaan ekonomi di lapangan peneliti menemukan beberapa kekhususan baik secara strategi, pendekatan maupun implikasi pada pemberdayaan pada masyarakat multikultural. Pertama, program pemberdayaan yang dilakukan lembaga filantropi disesuaikan dengan masyarakat. Agar program berjalan dengan optimal, maka program haruslah dapat menjangkau keberagaman masyarakat. Misalnya program lumbung pangan dan babi, maka lebih optimal lumbung pangan hal ini dikarenakan lumbung pangan dapat diterima oleh semua kalangan baik Islam maupun Kristen.

Kedua, tidak fanatik dengan golongannya sendiri/mengutamakan salah satu ideologinya, karena dimungkinkan di luar golongannya ada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya DPP dengan program lumbungnya yang bersifat umum (semua masyarakat boleh mengikuti), namun LMI program ayam petelurnya khusus untuk orang muslim, tentu DPP lebih mempunyai potensi berkembang di banding LMI (dalam hal ini).

Ketiga, Lembaga filantropi hanya sebagai fasilitator program pemberdayaan bukan pelaku dan pemegang peran penuh. Pemberdayaan masyarakat

homogen mayoritas mendominasi masyarakat sehingga semua program dikendalikan dan di jalankan oleh lembaga. Namun, dalam pemberdayaan masyarakat multicultural lebih optimal jika lembaga filantropi hanya sebagai fasilitator, sedangkan pelaksana dari masyarakat.



BAB VI PENUTUP

C. Kesimpulan

Hasil penelitian maupun pendialogkan konsep dan praktik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lembaga filantropi keagamaan pada masyarakat multikultural yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Dewan Pastoer Paroki (DPP) di desa Klepu, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LMI adalah menggunakan pendekatan dari bawah (bottom up). Sedangkan model pendekatan yang dilakukan oleh DPP adalah kebalikan dari LMI sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari atas ke bawah (top down) atau model tetesan dari atas (trickle down).

3. Implikasi dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan dapat diketahui salah satunya dengan melihat perubahan sosial dan kemandirian ekonomi yang ada di Desa Klepu.
 - c. Perubahan sosial keagamaan yang ditimbulkan akibat pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan LMI maupun DPP yaitu, tingkat religiusitas masyarakat semakin meningkat, baik dalam bidang hablumminannas maupun hablumminallah.

- d. Implikasi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga filantropi LMI dalam perubahan sosial ekonomi yaitu, tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang meningkat, gaya hidup semakin bertambah konsumtif (mewah), peningkatan penggunaan trend teknologi yang semakin berfariatif, berkurangnya angka pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan.

D. Saran Peneliti

Sesuai dengan kesimpulan di atas, bahwa untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kultural di Desa Klepu, saran peneliti sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan oleh lembaga DPP, sebaiknya lebih menggerakan dan melibatkan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan, agar masyarakat semakin mandiri dan benar-benar berdaya.
2. Lembaga LMI maupun DPP alangkah baiknya selalu melibatkan lembaga aparaturnegara/pemerintah dalam segala aspek, hal ini diperlukan agar program pemberdayaan dapat berkembang dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Anwar. Strategi Komunikasi. Bandung: Armilo, 1984.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Ponorogo dalam Angka 2015 dan Data Dari Kantor Camat Sooko.

Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2008.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia1995.

Gunawan, Sumodiningrat. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta : Gramedia, 1999.

Hikmat, Harry. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.

Hunger, David dan Thomas L. Wheelen. Manajemen Strategi. Yogyakarta: Andi, 2003.

Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Edisi I. Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997.

- Mardikanto, Totok dan Purwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Purnomo, Setiawan Hari. Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Suharto. Edi. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Retika Adhitama, 2005.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sumudiningrat, G. Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan. Yogyakarta: IDEA, 2000.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Supriana, Tjahya. Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Winarni, Tri. Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: Fisipol UGM 1998.
- Yayasan SPES. Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Yusri, FM Muhammad. Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-Agama di Indonesia dalam Jurnal Pendidikan Islam. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Jurnal

Arsiyah. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa” (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo), jurnal Wacana Vol. 12. Sidoarjo; 2009: 375.

Cholisin. “Pemberdayaan Masyarakat” (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011.

Hamdan, “Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp 2001) di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir.” Semarang: tkp, 2005: 14.

Kholis, Nur Dkk., “Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam”, Volume IV, No. 1, Juli Jogjakarta: Department Of Islamic Economics, 2010.

Lumintang, Juliana. “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat

di Desa Tara-Tara I” e-journal “Acta Diurna”
Volume IV. No.2. Tahun 2015.

- Maghfiroh, Siti. “Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Pada Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto).” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, 2015.
- Malau, Natalia Artha. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan” *Jurnal Ilmiah “Integritas”* Vol.1 No. 4. Deseber, 2015: 5.
- Marius, Jelamu Ardu. “Perubahan Sosial” *Kajian Analitik, Jurnal P Enyuluhan* Vol. 2, No. 2. Bogor: institute pertanian bogor, September 2006: 126.
- Martina. “Strategi Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kota Padang” Universitas Andalas, Padang, 2011.
- Muttaqin. Tatang. *Strategi Media Dalam Membangun Masyarakat Multikultur*. Juni 2006: 3.
- Nasrullah, Aan. “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur).” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 12,

No. 1, Juni. Nganjuk: Sekolah Tinggi Agama Islam (Stal) Miftahul 'Ula, 2015: 1

Prihatna, Andi Agung. *Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia, dalam Revitalisasi Filantropi Islam di Indonesia: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, diedit oleh Irfan Abu Bakar dan C.S. Bamualim. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005: 4.

Soedarso. “Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya”, *Jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 6 No.1, Juni. Surabaya, 2013: 62.

Sukmaniar. “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar” Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Wediawati, Besse. “Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi (Studi Pada Lembaga Zakat Dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma Di Kota Jambi).” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol. 14, No. 1. Jambi: Universitas Jambi, 2012:47.

Internet

Guamariasejarah.blogspot.co.id diakses pada Rabu 14 Desember 2016, 16:47 WIB.

<http://eprints.uny.ac.id/9747/2/BAB2-%2008108241086.pdf> diakses pada 22 juni 2017, 13 20 wib.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petera](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pendidikan_dan_Pengajaran_Kristen_Petera) diakses pada 26 Desember 2016, 21:37 WIB.

Lmizakat.org/profil-lembaga. Diakses pada selasa 23 Agustus 2016, 16:10 WIB.

Wikipedia(<https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?fulltext=Cari&search=indulgensi&searchToken=bkv1k1gkw526trqppcf0ske4f> diakses pada 28 Desember 2016, 06:30 WIB).

Wikipedia.org (Dewan Pastoer Paroki). Di akses pada 28 Desember 2016, 06:15 WIB.

www.bmh.or.id/tentang.php diakses pada 25 Desember 2016, 13:10 WIB.

